

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DI ALAMAI KAUM MUSLIM
ROHINGYA DI NEGARA MYANMAR**

MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Lembaga-Lembaga Internasional
yang diampu oleh:

Dr. H. Ija Sutana, M.Ag.



Disusun oleh:

Rizky Saputra Sulaeman

1193030085

SEMESTER 6 / KELAS B

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUBUNG DJATI BANDUNG

TAHUN AJARAN 2021/2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam karena atas berkat dan rahmatnya makalah ini dapat Penulis susun tepat pada waktunya.

Penulisan dan pembuatan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Lembaga-Lembaga Internasional. Adapun yang dibahas dalam makalah ini Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Di Alami Kaum Muslim Rohingya Di Negara Myanmar. Program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam pembuatan makalah ini, tidak jarang Penulis menemui kesulitan. Namun, Penulis sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membaca yang sifatnya membangun untuk dijadikan bahan masukan guna penulisan yang akan datang sehingga menjadi lebih baik lagi. Semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandung, 4 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	5
BAB II	6
PEMBAHASAN	6
A. Akar Konflik Negara Myanmar Dan Etnis Rohingya.....	6
B. Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar.....	7
C. Gambaran Peran Dan Fungsi AICHR sebagai Komisi HAM di ASEAN	10
BAB III	13
PENUTUP	13
Kesimpulan.....	13
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat pada setiap diri manusia dan Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak mutlak yang di miliki setiap individu. wajib miliki oleh setiap individu serta kelompok masyarakat, tidak membedakan antar suku, Hak ini adalah kebutuhan dasar yang kita wajib miliki oleh setiap individu serta kelompok masyarakat, tidak membedakan antar suku, gender maupun agama.¹

Adapun Negara juga telah melindungi akan hak asasi manusia tersebut di dalam Undang- Undang Dasar tahun 1945, hak asasi dari setiap diri manusia belum sepenuhnya akan terjamin dan terlindungi dengan adanya UUD tersebut, maka dipelুকannya juga peran dari masyarakat itu sendiri dalam menegakkan HAM.²

Adapun masalah yang sering kita jumpai dari HAM banyak nya hak hak yang di sia siakan penerapan nya atas HAM itu sendiri padahal berbeda dengan hakekatnya hak manusia itu tidak ada yang berbeda dan semua hak manusia itu sama, karena itulah HAM menyebabkan adanya kewajiban yang mana kewajiban tersebut akan setara dan menjadi kesatuan. membiarkan salah satunya saja maka akan menimbulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang akan berdampak buruk untuk kedepannya. sendiri sejujurnya masih banyak yang belum mengerti akan apa saja hak-hak mereka yang mana salah satunya merupakan hak yang menjadi kewajiban mereka dan itu saja masih banyak yang terabaikan. banyak yang terabaikan. Negara beradab yang mulia dan berdaulat merupakan negara yang dapat melindungi hak-hak seluruh warganya. Dari perkembangan hak asasi manusia, terdapat 3 aspek yang perlu di pertahankan atau dilestarikan : integritas, kebebasan dan kesetaraan, dan untuk mencapai ketiga aspek tersebut, menghormati harkat dan martabat semua manusia dibutuhkan.³

¹ HM. Suaib Didu, Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional (Bandung: Iris, 2008), hal. 17

² Besar. "Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia." Humaniora Volume 2 No.1 April 2011, hal. 201-213

³ Elsam (e.d) Ifdhal kasim dan Johannes da Masenus Arus, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya: EsaiEsai Pilihan Buku 2 (Jakarta: Elsam Press, 2001), hal. 10.

Dalam dunia Barat negara Myanmar dikenal juga sebagai Burma atau Birma yang mana itu merupakan negara yang sudah diperintahkan oleh pemerintah militer di Asia dari tentara itu yang melakukan kekerasan kepada para demonstran. Rohingya juga merupakan salah satu etnis yang menetap di Myanmar yang mendiami bagian utara Rakhane yang dapat di kenal juga sebagai kota Arakan. Rohingya merupakan kaum muslim minoritas yang telah tinggal di bagian barat Myanmar selama berabad-abad, dan terdapat 600.000 jiwa kaum rohingya. Pemerintah myanmar juga tidak menganggap mereka ada karena di anggap sebagai bagian dari etnis Bengali. Oleh karena itu mereka tidak memiliki kewarganegaraan Myanmar.⁴

Pelanggaran HAM yang telah di rasakan oleh Etnis Rohingya itu sendiri sudah sangat banyak, terutama yaitu tindakan genosida yang mereka alami sejak tahun 1978. Mereka memiliki keterbatasan dalam segala hal dengan ketat yang mana mereka juga di usir dari negaranya sendiri untuk meninggalkan Myanmar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akar Konflik Negara Myanmar Dan Etnis Rohingya?
2. Bagaimana Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar?
3. Bagaimana Gambaran Peran Dan Fungsi AICHR sebagai Komisi HAM di ASEAN?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Akar Konflik Negara Myanmar Dan Etnis Rohingya
2. Untuk Mengetahui Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar
3. Untuk Mengetahui Gambaran Peran Dan Fungsi AICHR sebagai Komisi HAM di ASEAN

⁴ Faniati, Tamia Dian Ayu. 2012, "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar." Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Akar Konflik Negara Myanmar Dan Etnis Rohingya

Sebelum masuk ke akar konflik, lebih baik kita mengetahui tentang negara Myanmar itu sendiri terlebih dahulu, negara Myanmar di bagi menjadi tujuh bagian yaitu yang dinamai dengan etnis minoritas, Adapun sebagai beberapa wilayah yang masuk ke dalam Asia Tenggara yaitu ada beberapa misal nya, India, Laos Thailand, Tiongkok dan Bangladesh, dan di dari beberapa kelompok etnik yang memiliki masing-masing Bahasa dan budayanya sendiri, Adapun etnis terbesar yaitu Burma mereka berasal dari Sino Tibet yang berada di daratan tengah Myanmar.

Adapun agama yang di anut oleh etnis Burma yaitu Buddha, Adapun juga mereka menguasai dari beberapa segment seperti dari segi pemerintahan dan militer dan juga tentu nya menjadi bagian dari mayoritas di Myanmar, tetapi ada beberapa hal pun terjadi di bagian negara Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh. Di wilayah tersebut terdapat etnis Rakhine yang mana ada yang beragama Islam, dan juga jumlah dari penduduk Rakhine 4 persen dari penduduk Rakhine, yang mana beragama Buddha, Adapun yang penganut Muslim Rohingya menjadi kelompok yang minoritas di negara Myanmar.

Adapun awal mula konflik pemerintahan juna militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1962, yang mana diskriminasi terhadap etnik minoritas mulai di jalankan terutama pada etnis masyarakat Rohingya yang mana mereka di anggap bukan asli masyarakat asli dari Burma, Adapun pada tahun 1962 jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga jenderal tersebut menjadi kepala negara, Adapun system politik Myanmar langsung berubah yang mana menjadi otoriter. Adapun etnis atau kaum Rohingya di anggap nya sebagai rezim oleh si kepala negara tersebut atau si jenderal tadi, yang mana di anggap sebuah ancaman sehingga di laksanakan lah sebuah operasi untuk menumpas pergerakan separatis dan mengontrol penduduk Rohingya tersebut pada tahun 1978.

Adapun pada masa rezim tersebut hingga tahun 2000 etnis Rohingya beberapa kali mengalami keadaan yang tidak seharusnya mereka rasakan yang mana pada saat

itu mereka merasakan diskriminasi yang sangat berat, pada masa rezim militer tersebut etnis Rohingya mengalami situasi yang sangat berat di mana pemberitaan media internasional mulai membuka fakta-fakta pada saat terjadinya konflik yang ada di kaum Rohingya. Adapun dengan kasus ini kemudian memancing etnis Rakhine yang kemudian berujung pada lingkaran konflik yang tidak berhenti.

Pada bulan Juli 2012 konflik ini pun memuncak dengan adanya beberapa aktifitas seperti pembakaran terhadap rumah yang dihuni oleh etnis Rohingya dan juga di mana ada penyerangan yang dilakukan oleh kedua etnis. Adapun banyaknya beberapa faktor yang memicu terjadinya meledaknya konflik tersebut di provinsi Rakhine terhadap etnis Rohingya, dan juga tidak hanya pemerintah yang kejam tetapi konflik yang terjadi juga terletak pada penggolongan etnis. Adapun akar awal yang menjadi awal konflik ini yaitu adanya kecemburuan sosial terhadap etnis Rohingya dalam beberapa dasawarsa terus meningkat. Meskipun sebagai etnis minoritas tetapi etnis Rohingya mampu terlibat dan bekerja dalam pemerintahan Myanmar.

Hal ini pun menyebabkan beberapa kecurigaan pada etnis Rakhine yang mana bagi mereka adanya kaum Rohingya dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu pada diri mereka dan juga menurut mereka kaum Rohingya mengurangi hak lahan dan ekonomi, yang mana khususnya di daerah Arakan Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis muslim. Adapun pada tahun 1962 undang-undang kewarganegaraan Burma pada tahun 1982 telah menghapus keberadaan kaum etnis Rohingya sebagai etnis Myanmar.

Dengan hal ini peniadaan tersebut adalah menghilangkan etnis Rohingya dalam hal yaitu untuk hak bebas bergerak dan berpindah tempat, hak menikah dan hak memiliki keturunan dan hak pendidikan dan hak berdagang dan usaha, sejatinya etnis Rohingya tidak ada niat memisahkan diri dan merdeka di Myanmar mereka hanya ingin diakui sebagai warga negara Myanmar yang berhak hidup dan bebas dari rasa takut dan kemiskinan serta bebas dalam menjalankan agamanya.

B. Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar

Adapun pada tanggal 5 Juni pada tahun 2012 para budha di kota Rathedung beberapa puluh kilometer pada sebelah utara mereka menyelenggarakan sebuah diskusi atau pertemuan antar budha yang mana menyerukan kepada orang-orang Arakan dari etnis budha Rakhine agar tidak memberikan pekerjaan kepada etnis Rohingya muslim,

seperti pekerjaan kasar seperti buruh, tukang, dan sebagai buru tani dan juga pekerjaan lain nya. Adapun dalam pertemuan tersebut menghasilkan yang mana mereka menyatakan bahwa etnis Rohingya muslim tidak boleh di pekerjakan maupun dari segi pemerintahan, pejabat public dan staf ataupun pekerjaan lain oleh LSM yang berjalan di kota tersebut.⁵

Adapun hasil rapat para biksu Rathedaungpa tersebut. Hasil rekomendasi petisi ini selanjutnya akan diajukan pada pemerintah Myanmar. Berikut beberapa point petisi dari biksu Rathedaung yaitu :⁶

1. Permohonan guna membentuk sebuah aturan untuk mengendalikan angka kelahiran komunitas Muslim Rhingya di Rakhine.
2. Menghapus desa-desa di daerah Bengali yang terletak di dekat Universitas Sittwe dan di samping jalur komunikasi di sepanjang Arakan Rakhine.
3. Penolakan reintegrasi yang akan meletakkan umat Islam dan Budha hidup berdampingan di wilayah Arakan Rakhine.
4. Pengusiran penduduk etnis muslim Rohingya dengan cara kekerasan.
5. Menyerukan adanya milisi rakyat Budha dan meminta kepada pemerintah untuk mensupply senjata kepada milisi rakyat Budha tersebut guna melakukan perlawanan terhadap kelompok etnis Rohingya yang enggan untuk meninggalkan Arakan Rakhine.

Di lihat dari segi dalam beberapa point tersebut dalam petisi tersebut dalam kelompok etnis agama budha Nampak nya tidak mau hidup berdampingan dengan etnis kaum Rohingya muslim , Adapun dalam penolakan tersebut ada nya secara tidak langsung mengusir etnis muslim Rohingya, Adapun point utama dari petisi tersebut mereka, hal ini mtentunya menjadi nilai dilemma tersendiri bagi kaum etnis muslim Rohingya mengingat mereka pada umum nya yaitu golongan etnis dengan tingkat ekonomi dan hidup di daerah lain, dan juga pada point point petisi di atas mengandung unsur unsur pelanggaran HAM.⁷

⁵ Mr.R.B. Smart, *Burma Gazetteer-Akyab District*, Rangoon. 1957, h.14.

⁶ Joseph Allchin, *The Rohingya, Myths and Misinformation*, Democratic Voice of Burma,

⁷ *Burmese Monks Who Preach Intolerance Against Muslim Rohingyas*, BBC News, November 21, 2012, diakses dalam: <http://www.bbc.com/news/av/world-asia-20427889/the-burmese-monks-mwho-preach-intolerance-against-muslim-rohingyas>, 2 Juli 2022, pukul 09.00 WIB.

Adapun penduduk Rohingya yang makin kesini makin tersakiti karena ada nya status agama muslim Rohingya yang di mana tidak di anggap sebagai warga negara resmi, Adapun beberapa laporan dari media jumlah etnis Rohingya yang di tolak di arakan yaitu menjapai 1 juta orang atau bahkan bisa melebihi dari angka tersebut, mereka berjuang dan rela mengorbankan nyawanya terombang ambing untuk mencari perlindungan di negara lain, ahkan etnis ini sudah sejak lama tidak dianggap sebagai salah satu etnis di Myanmar, sehingga mereka kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminatif, Adapun pada tahun 1982 negara myanmar memberikan beberapa kriteria yang cukup ketat bagi para etnis tertentu untuk menjadi warga negara Myanmar,⁸

Konflik yang terjadi antara etnis Budha Rakhine dan Rohingya merupakan imbas dari kebijakan pemerintah Myanmar yang masih belum mengakui eksistensi Muslim Rohingya, meskipun secara historis bukti telah menyebutkan bahwa Muslim Rohingya merupakan entitas asli Arakan. Para muslim Rohingya pada dasarnya telah lama menjadi korban dari ekspresi diskriminasi Junta Militer Myanmar yang tidak mengakui etni ini sebagai bagian dari 135 kelompok etnis di Myanmar. Rohingya tidak diperlakukan secara diskriminatif, disiksa, diintimidasi hingga mereka berpindah ke kawasan pedalaman Rakhine. Mereka tetap tidak ingin meninggalkan Myanmar. Karena upaya pengusiran secara represif dari tahun-ke tahun, populasi etnis Muslim Rohingya berkurang secara perlahan namun pasti setiap tahunnya. Pengurangan ini tidak hanya disebabkan oleh angka kematian melainkan juga dinilai dari seberapa banyak etnis Muslim Rohingya yang mengungsi ke luar Myanmar.⁹

Hingga agustus tahun 2012, total korban etnis muslim Rohingya telah mencapai 77 orang meninggal, 109 orang luka. Selain korban meninggal dan luka- luka, konflik ini juga mengakibatkan 5000 rumah rusak atau terbakar, 17 masjid rusak. Dan juga pengungsi etnis Rohingya yang berjumlah 28.000 berada di tempat pengungsian yang mana meningkat menjadi 53.000. pengungsi Rakhai 24.000. Korban ini kemungkinan masih bertambah selama pihak otoritas Myanmar belum memberikan respon konkret.¹⁰ Bukti-bukti ini telah membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM karena unsur perampasan hak hidup seseorang atau suatu golongan.

⁸ *Jika Kita Seorang Rohingya*, Op.Cit., h 12

⁹ *Ibid.*, h 12-13

¹⁰ Tegar Arief Fadli, Ini Jumlah Korban Kekerasan Rohingya Versi SBY, Okezone 4 Agustus 2012, diakses dalam: <http://news.okezone.com/read/2012/08/04/337/673315/ini-jumlah-korban-kekerasan-rohingya-versi-sby>, 2 Juli 2022, pukul12.00 WIB.

C. Gambaran Peran Dan Fungsi AICHR sebagai Komisi HAM di ASEAN

Selama lebih dari 4 dekade berdirinya ASEAN, organisasi ini terus berusaha untuk melakukan improvement guna berupaya memperbaiki kehidupan warga di negara-negara anggotanya. HAM Hak Asasi Manusia telah lama menjadi komitmen bersama negara anggota ASEAN guna menciptakan rasa aman bagi setiap warga negara.

Adapun para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN juga menekankan bahwa pelanggaran hak asasi manusia harus diperbaiki dan tidak boleh ditolerir dengan dalih apapun, Mereka selanjutnya menekankan pentingnya memperkuat kerja sama internasional untuk semua aspek HAM hak asasi manusia dan bahwa semua pemerintah harus menjunjung tinggi standar manusiawi dan menghormati martabat manusia Dalam hal ini untuk mendukung Deklarasi Wina dan Program Aksi 25 Juni 1993, mereka sepakat bahwa ASEAN juga harus mempertimbangkan pembentukan mekanisme regional yang tepat mengenai hak asasi manusia. Untuk pertama kalinya, ASEAN menempatkan diri pada pengembangan rezim hak asasi manusia regional.¹¹

Mengambil komitmen yang telah mereka buat pada tahun 1993, pembentukan mekanisme regional tentang HAM sangatlah bersifat urgent. Setelah diadopsinya Piagam ASEAN, Pasal 14 menyatakan bahwa Sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN yang berkaitan adanya promosi dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental ASEAN harus membentuk Lembaga seperti badan HAM ASEAN¹², Berasaskan pasal 14 piagam ASEAN, negara-negara anggota ASEAN kemudian sepakat untuk membentuk sebuah komisi perlindungan HAM yang kemudian di sebut ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR).

Berdasarkan peran dan fungsinya, AICHR mempunyai mempunyai 14 poin fungsi dasar. Berikut peran dan fungsi lembaga AICHR :

1. Mengembangkan strategi untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk melengkapi pembangunan Komunitas ASEAN.

¹¹ AICHR, diakses dalam: <http://aichr.org/about/>, 2 Jlii 2022, pukul 13.45 WIB

¹² *Ibid.*

2. Membangun kerangka kerjasama hak asasi manusia melalui berbagai konvensi ASEAN dan instrument lainnya berurusan dengan hak asasi manusia.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat ASEAN melalui pendidikan, penelitian dan penyebaran informasi.
4. Meningkatkan kesadaran negara ASEAN dalam mengimplementasikan kewajiban perjanjian hak asasi manusia internasional yang dilakukan oleh Negara-negara Anggota ASEAN.
5. Untuk mendorong Negara-negara Anggota ASEAN dalam mempertimbangkan akses dan meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional
6. Untuk mempromosikan implementasi penuh ASEAN legal instrument yang terkait dengan hak asasi manusia.
7. Memberikan layanan konsultasi dan bantuan teknis hak asasi manusia untuk badan-badan sektoral atau negara-negara di ASEAN.
8. Melakukan dialog dan konsultasi dengan negara ASEAN lainnya dan entitas yang terkait dengan ASEAN, termasuk organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Bab V Piagam ASEAN.
9. Sebagai badan konsultasi dan kerjasama antara negara ASEAN dan institusi internasional lain dalam hal Hak asasi manusia.
10. Sebagai lembaga pencari informasi dari negara anggota ASEAN terkait isu-isu HAM dan promosi dan perlindungan hak asasi manusia;
11. Sebagai lembaga yang dapat melakukan pendekatan umum dalam hal isu kemanusiaan yang mempengaruhi kepentingan untuk ASEAN.
12. Menyiapkan studi tentang isu tematik hak asasi manusia ASEAN.
13. Menyerahkan laporan tahunan tentang kegiatannya, atau laporan lainnya jika dianggap perlu, kepada Menteri Luar Negeri ASEAN.
14. Melakukan tugas lain diamanahkan oleh ASEAN.

Ada pun beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan tajam dan berkepanjangan konflik agama di Asia Tenggara belakangan ini misalnya saja di negara Myanmar yang sedang konflik antara etnis Rohingya, dari beberapa penyebab yang ada

lima penyebab utama yang bisa jadi pemicu yaitu, ketegangan politik regional, pemerintahan yang lemah, kejahatan terorganisir, dan anti sekularisme dan kesenjangan ekonomi dan pembatas media, bukan karena benturan keyakinan konflik itu sendiri merupakan gejala psikologis masyarakat yang menghadapi situasi sosial yang kompleks terkait perebutan kekuasaan atau dominasi.¹³

Dalam hal isu isu permasalahan internasional kita berbicara mengenai negara Myanmar bahwasanya mereka ingin menyingkirkan etnis Rohingya yang mana mereka melakukan diskriminasi terhadap etnis tersebut, di sini kita di negara Indonesia sangat membuka atau menampung etnis tersebut yang banyak sekali datang ke negara Indonesia yang mana kita di negara Indonesia ini agama nya mayoritas agama muslim dan juga di didik untuk berbuat baik apalagi sesama agama muslim dan juga kita ini sebagai masyarakat Indonesia pasti membantu etnis Rohingya yang sedang bermasalah di negara nya tersebut.¹⁴

Berdasarkan 14 poin peran dan fungsi AICHR, dapat dilihat bahwa lembaga ini dapat menjadi lembaga yang turut serta dalam mempromosikan perlindungan HAM dan sebagai lembaga atau aktor resolusi konflik yang berkaitan dengan isu HAM internasional khususnya dalam ruang lingkup regional ASEAN. Tentunya hal ini berlaku sama dalam kasus yang penulis angkat yaitu isu dalam pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di negara Myanmar.

¹³ Suntana, I. & Tresnawaty, B. (2021). Krisis Sosial Multidimensi dan Kekerasan Beragama di Asia Tenggara: Agenda Strategis Regional, Pemerintahan Sipil yang Lemah, Kejahatan Tritunggal, Kesenjangan Kekayaan, dan Jurnalisme Terkooptasi. *Jurnal Budaya dan Nilai dalam Pendidikan*, 4(2), 1-13.

¹⁴ Suntana, I. & Tresnawaty, B. (2020). *Pengetahuan Politik dan Perilaku Politik di Kalangan Muslim Terdidik di Indonesia*, 11 (4), 149-174.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Myanmar sudah terjadi sejak lama namun media internasional baru mulai meliput tahun 2012 sehingga banyak negara mulai mengklaim tindakan pemerintah Myanmar. Akibat respon dunia internasional, konflik semakin memanas yang ditandai dengan pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran rumah-rumah warga etnis Rohingya. Selanjutnya konflik etnis antara Rohingya dan Rakhine tak mendapat titik damai. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga internasional maupun non internasional serta negara-negara, tidak membuat konflik itu terselesaikan. Justru semakin banyak tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya.

Konflik yang terjadi antara etnis Budha Rakhine dan Rohingya merupakan imbas dari kebijakan pemerintah Myanmar yang masih belum mengakui eksistensi Muslim Rohingya, meskipun secara historis bukti telah menyebutkan bahwa Muslim Rohingya merupakan entitas asli Arakan. Para muslim Rohingya pada dasarnya telah lama menjadi korban dari ekspresi diskriminasi Junta Militer Myanmar yang tidak mengakui etni ini sebagai bagian dari 135 kelompok etnis di Myanmar. Rohingya tidak diperlakukan secara diskriminatif, disiksa, diintimidasi hingga mereka berpindah ke kawasan pedalaman Rakhine. Mereka tetap tidak ingin meninggalkan Myanmar. Karena upaya pengusiran secara represif dari tahun-ke-tahun, populasi etnis Muslim Rohingya berkurang secara perlahan namun pasti setiap tahunnya. Pengurangan ini tidak hanya disebabkan oleh angka kematian melainkan juga dinilai dari seberapa banyak etnis Muslim Rohingya yang mengungsi ke luar Myanmar.

Selama lebih dari 4 dekade berdirinya ASEAN, organisasi ini terus berusaha untuk melakukan improvement guna berupaya memperbaiki kehidupan warga di negara-negara anggotanya. Adapun para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN juga menekankan bahwa pelanggaran hak asasi manusia harus diperbaiki dan tidak boleh ditolerir dengan dalih apapun, Mereka selanjutnya menekankan pentingnya memperkuat kerja sama internasional untuk semua aspek HAM hak asasi manusia dan bahwa semua pemerintah harus menjunjung tinggi standar manusiawi dan menghormati martabat manusia Dalam hal ini untuk mendukung Deklarasi Wina dan Program Aksi 25 Juni 1993, mereka sepakat bahwa ASEAN juga harus mempertimbangkan pembentukan mekanisme regional yang tepat mengenai hak asasi

manusia. Mengambil komitmen yang telah mereka buat pada tahun 1993,mpembentukan mekanisme regional tentang HAM sangatlah bersifat urgent.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Tiara Dewinta, 2016. Peran Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine- Rohingya di Myanmar Tahun 2012- 2013. *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro.
- Suntana, I. & Tresnawaty, B. (2020). *Pengetahuan Politik dan Perilaku Politik di Kalangan Muslim Terdidik di Indonesia*, 11 (4), 149-174.
- Suntana, I. & Tresnawaty, B. (2021). Krisis Sosial Multidimensi dan Kekerasan Beragama di Asia Tenggara: Agenda Strategis Regional, Pemerintahan Sipil yang Lemah, Kejahatan Tritunggal, Kesenjangan Kekayaan, dan Jurnalisme Terkooptasi. *Jurnal Budaya dan Nilai dalam Pendidikan* ,4(2), 1-13.
- Suntana, I. & Tresnawaty, B. (2021). *Krisis Sosial Multidimensi dan Kekerasan Beragama di Asia Tenggara: Agenda Strategis Regional, Pemerintahan Sipil yang Lemah, Kejahatan Tritunggal, Kesenjangan Kekayaan, dan Jurnalisme Terkooptasi. Jurnal Budaya dan Nilai dalam Pendidikan* ,4(2), 1-13.
- Susanti, Aviantina DKK, Penyelesaian Kasus pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Triono, 2014. Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya. *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.2 Juli-Desember.

Sumber Jurnal

- Angela Merici Siba. M & Nurul Qomari'ah Anggi, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations On Rohingya Confilc*, *Jurnal Islamic World and Politics*, Vol.2.

Sumber Lain

- Penyebab Konflik Rohingya di Myanmar, Berikut Penjelasannya di akses melalui <https://www.merdeka.com/jabar/penyebab-konflik-rohingya-di-myanmar-berikut-penjelasannya-klm.html> pada, 2 juli 2022.

Mengenal Asal Usul Etnis Rohingya, Berikut Penjelasannya di akses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/29/133000269/mengenal-asal-usul-etnis-rohingya> 2 juli 2022.